

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

(2012). In Lilik Mulyadi (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (p. 41).

PT Alumni.

Abidin, A. Z. (1995). *Hukum Pidana*. Sinar Grafik.

Ahmad Akasya. (2022, Mei 31). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Militer yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan yang Disengaja ((Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)*.

Andi Hamzah. (1985). *Sistem Pidana dan pembedaan Indonesia* (1st ed.). Pradnya Paramita.

Ariwibowo, R. D. (2012, Juni 22). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor: 05- K/PMT.III/BDG/AD/II/2011)*.

Ayu Efritadewi. (2020). *Hukum Pidana* (2nd ed.). Umrah Press.

Chairul Huda. (2016). In *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (6th ed., p. 125). Kencana Prenada.

Dahl, A. W. (2001, Juni 20). Makalah Lokakarya Internasional Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Tanggung Jawab Komando*, 24.

Djoko Prakoso. (1988). *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty.

E. Utrecht. (1958). *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*. Pustaka Tinta Mas.

Hans Kelsen. (2018). *Teori Umum Tentang Negara Dan Hukum (General Theory of Law and State)*. Nusa Media.

- Hyronimus Rheti. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap dari Klasik ke Postmodernisme* (5th ed.). Universitas Atma Jaya.
- Joko Setiyono. (2019). *Pertanggungjawaban Komando Dalam Peradilan HAM Nasional Indonesia dan Internasional*. Pustaka Magister.
- Karnasudirdja, E. D. (2006). *Tanggung Jawab Seorang Atasan Terhadap Bawahan Yang Melakukan Pelanggaran HAM Berat Dan Penerapannya Oleh Pengadilan Pidana Internasional Dan Pengadilan HAM Indonesia*. PT. Tatanusa.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik pradilan* (1st ed.). Mandar Maju.
- Mahrus Ali. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Marjanne Termorshuizen, Breur, C. S., & Lapien, H. D. (2002). *Kamus hukum Belanda-Indonesia* (1st ed.). Djambatan.
- Marliana. (2011). In *Hukum Penitensier* (p. 59). Reflika Aditama.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1997). *Memahami Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Prandya Paramita.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (revisi ke-14 ed.). Prenamedia Group.
- Moeljatno. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bumi Askara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (revisi ed.). Rineka Cipta.
- M. Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Radja Grafindo Persada.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Barda Nawawi. (1992). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

- Muladi, & Dwidja Prayitno. (1991). , *Pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Roeslan Saleh. (1983). *Stelstel Pidana Indonesia*. Aksara Baru.
- R. Soesilo. (1991). , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Demi* (1st ed.). Politeia.
- Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (1st ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya* (2nd ed.). AHM-PTHM.
- Sianturi, S. R. (2012). *asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Babinkum.
- S.R Sianturi. (1985). *Hukum Pidana Militer* (Revisi ed.). Alumni AHAM-PTHM.
- Syamsu, M. A. (16). *Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana* (pertama ed.). Prenadamedia group.
- Zainal Abidin. (2016). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP* (2nd ed.). Elsam.
- ARTIKEL :
- (n.d.). BAB II LANDASAN TEORI Teori adalah sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, yang digunakan untuk menjelaskan suatu. Retrieved Agustus 7, 2023, from https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/206/5/128400047_file5.pdf
- (n.d.). 53 BAB – III METODE PENELITIAN 1.1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian h. Retrieved Agustus 7, 2023, from https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1438/6/131803052_file%206.pdf

(n.d.). BAB II KERANGKA TEORETIS, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

PENELITIAN. Retrieved Agustus 7, 2023, from

<http://digilib.unimed.ac.id/15084/1/208311030%20BAB%20II.pdf>

Admin Univ. (2022, Oktober 26). *Hukum Publik dan Hukum Privat*.

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-publik-dan-hukum-privat/>

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Dakwaan dan Pemidanaan Dalam Perkara Tindak

Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor

51/Pid.B/2015/PN.SBG). (n.d.). Retrieved Agustus 3, 2023, from

<http://repository.uki.ac.id/5473/2/BABI.pdf>

Annur, C. M. (2023, Januari 16). Ini provinsi dengan kasus pembunuhan terbanyak pada

tahun 2021. *10 Provinsi/Wilayah Kerja Polda dengan Laporan Kasus*

Pembunuhan Terbanyak (2021).

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/16/ini-provinsi-dengan-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/16/ini-provinsi-dengan-kasus-pembunuhan-terbanyak-pada-2021)

[kasus-pembunuhan-terbanyak-pada-2021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/16/ini-provinsi-dengan-kasus-pembunuhan-terbanyak-pada-2021)

BAB III METODE PENELITIAN. (n.d.). Unika Repository. Retrieved Agustus 7, 2023,

from

<http://repository.unika.ac.id/17266/4/14.D1.0293%20SANANDYA%20SILMI%20P>

[ANDANWANGI%20%288.71%29.BAB%20III.pdf](http://repository.unika.ac.id/17266/4/14.D1.0293%20SANANDYA%20SILMI%20P)

BAB II TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA MILITER. (n.d.). repo unpas. Retrieved

August 2, 2023, from <http://repository.unpas.ac.id/13529/4/BAB%20II.pdf>

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara Indonesia adalah negara yang

berdasar atas hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasa. (n.d.). Repository

Universitas Muhammadiyah Jember. Retrieved Agustus 7, 2023, from

<http://repository.unmuahjember.ac.id/1953/9/BAB%20I.pdf>

Damanhuri Fattah. (2013). *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, 9(2), 6.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589>

Fai. (2022, Oktober 30). *Hukum Pidana Adalah*. <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/>

Faisal, B. F. (2023, November 29). [Wawancara] [Audio]. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jakarta Timur, Dki Jakarta, Indonesia.

46 BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 1.

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis pe. (n.d.). IAIN Kudus Repository.

Retrieved August 7, 2023, from

<http://repository.iainkudus.ac.id/4080/6/6.BAB%20III.pdf>

Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. (2023, November 29). [Hasil Wawancara] [Audiofisual]. Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jakarta Timur, Dki Jakarta, Indonesia

(Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Trans.) [Hasil wawancara] [Audiofisual].

(2023, November 27). Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Jakarta Tmir, Dki Jakarta, Indonesia.

Hendra Astrada. (2017, Februari). *Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap*

Pelaku Pembunuhan Berencana, 1. <http://repository.um->

[palembang.ac.id/id/eprint/2324/1/SKRIPSI2040-1804074122.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2324/1/SKRIPSI2040-1804074122.pdf)

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembunuhan berencana dalam KUHP

diatur dalam 340 adalah "Barang siapa sengaja d. (n.d.). Repository UM Metro.

Retrieved Agustus 7, 2023, from

<https://repository.umm metro.ac.id/files/artikel/cf362e6999efab4ddbea503c8f145521.pdf>

Kodiklat TNI-AD. (n.d.). *Kodiklat TNI-AD*. https://kodiklat-tniad.mil.id/kode_kehormatan

- Maksum Rangkuti. (2023, November 21). Retrieved Novembet 25, 2023, from <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>
- Nelwitis. (2018, Mei 14). Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor putusan Nomor 594/Pid.B/2015.PN.Pdg). <http://scholar.unand.ac.id/34433/>
- Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan NO.182/Pid.B/2018/PN BLORA)*. (n.d.). Retrieved Agustus 1, 2023, from http://repository.unika.ac.id/29409/2/16.C1.0108-Sabrilian%20Prasicodheny-BAB%20I_a.pdf
- Pertanggungjawaban Pidana Komandan* (Muladi, Compiler) [Makalah Kuliah Umum]. (2003). FH Undip.
- P.L.T. Sihombing. (2004, November). *Pertanggungjawaban Komando*, 2(2), 67. <https://jurnalham.komnasham.go.id/index.php/jurnalasasi/article/viewFile/25/19>
- Pramita, K. D., & suputra, I. G. K. R. (2021, september). JURNAL PACTA SUNT SERVANDA. *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor :1298/PID.B/2018/PN.DPS*, 2(2), 2. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/468>
- Ricky Sembiring. (2018). *Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles*, (2), 144. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/539>
- Rifki Arsilan. (2022, Juni 7). *Ini Alasan Hakim Militer Hukum Kolonel Priyanto Penjara Seumur Hidup*. <https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1482431-ini-alasan-hakim-militer-hukum-kolonel-priyanto-penjara-seumur-hidup>

- Sugiono, Sastrawan, K. W., & Surata, I. N. (2015, Agustus). *Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar*, 3(1), 3.
[https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/448/373#:~:text=%2026%20\(1\)%20KUHPM%20hanya,mengenai%20kriteria%20atau%20parameter%20layak](https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/448/373#:~:text=%2026%20(1)%20KUHPM%20hanya,mengenai%20kriteria%20atau%20parameter%20layak)
- Wantu, F. M. (2016, Desember 26). *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, 12(3), 484-485.
<https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/735/mewujudkan-kepastian-hukum-keadilan-dan-kemanfaatan-dalam-putusan-hakim-di-peradilan-perdata.html>
- Yanto Sufardi. (2010, Oktober 4). *Hukum Ius Quia Iustum. Penerapan Hukum Progresif dalam Pemulihan Krisis Hukum di tengah Kemacetan Demokrasi di Era Global*, 17(2), 236.
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=2gcwK4sAAAAJ&citation_for_view=2gcwK4sAAAAJ:qjMakFHDy7sC
- Yohanes Suhardin. (2009). *Jurnal Mimbar Hukum. Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, 21(2), 350.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16261>
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-undang Hukum Militer (KUHPM)
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), 2.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Displin Militer (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomro 257), 2 Huruf, a, Huruf e dan Huruf f.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Tugas pokok TNI